

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iftitah, A., et. al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Krisnawawati, E. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: Utomo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Buku II. Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, B. & Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, A. H. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Sugiarto, U. S. (2016). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Intrans Publishing.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandar Lampung: LPPM Unila.

Jurnal

- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 51-65. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.311>
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>
- Bidasari, A. (2016). Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 29-42. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.79>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (*Afwezig*) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY. *Transparansi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i1339>
- Idrus, M. A. (2017). Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia). *Jurnal Ius*, 5(1), 32-48.

- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Jati, Z. A. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 115-130. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 130-145. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177>
- Nasrudin, N., Washliati, L., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 37-55. <https://doi.org/10.37776/zh.v14i2.548>
- Patahuddin, M. K. (2023). Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Administratum*, 11(1).

- Pinasti, K. J., Raiza, F. A. I., Wafiroh, A., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Kepastian Hukum Harta Benda yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan KUH Perdata. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3 (Proceeding). <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.206>
- Putri, A. B. S. (2017). Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 12-21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1726>
- Rachmawati, Y. & Nugraheni, A. S. C. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan *Afwezigheid* PT Bentoel Internasional Investama. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(4), 161–173. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.521>
- Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. (2024). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli di Bawah Tangan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 55-69. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.239>
- Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.21>
- Rizki, R., Silalahi, A. C., Laia, S., & Indara, R. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Tentang Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Pembagian Waris (Nomor 78/Pdt. P/2018/PN. Mad). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis*

Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 263-283.

<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3439>

Saputra, R. (2019). Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif. *Wacana Hukum*, 25(1), 10-18.

Slamet, A. (2021). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 117-129. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5166>

Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105-105. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1590>

Sutanto, H., & Tanuwidjaja, T. H. (2017). Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir). *Perspektif*, 22(3), 231-237.

Tahir, S. A. B., Franata, R. P. A., & Sidiq, M. A. H. (2021). Implikasi *Afwezigheid* Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 213-234. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2775>

Tanuwidjaja, T. H. (2019). Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 21-34. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.831>

Tejawati, D. (2021). Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 251-273. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p251-273>

Zainal, F. (2022). Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Perkara Perdata. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(1), 75-89.
<https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan. Berita Negara Nomor 1027 Tahun 2013.

Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Tana, E. (2020). *Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir*. (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Wibowo, S. C. M. (2019). *Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan*. (Skripsi Sarjana. Universitas Pancasakti Tegal).

Internet

Asshiddiqie, J. (2012). *Penegakan Hukum* (Makalah). Universitas Sebelas Maret.
Diakses pada 23 Februari 2025, dari
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf

Lain-Lain

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. (21 Februari 2025). Wawancara Pribadi.
Pengadilan Negeri Jombang.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum. (21 Februari 2025). Wawancara Pribadi.
Pengadilan Negeri Jombang.